

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
SERTA KELAUTAN)**

---

---

Tahun Sidang : 2019-2020  
Masa Persidangan : I  
Rapat ke- : 8  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Senin, 11 November 2019  
Waktu : 13.25 s.d. 16.45 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)  
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta  
Acara : Membahas Usulan RUU yang akan Dibahas dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dan RUU Prioritas Tahun 2020  
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F.PDIP)  
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo  
Hadir : A. 44 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI  
B. Hadir Pemerintah:  
1. Dr. Ir. Momon Rusmono, M.S. (Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian);  
2. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);  
3. Ir. R. Nilanto Perbowo, M.Sc. (Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan).

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, membahas Usulan RUU yang akan Dibahas dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dan RUU Prioritas Tahun 2020, dibuka pukul 13.25 WIB oleh Ketua Rapat Sudin, S.E. dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI menerima usulan Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024 yaitu:
  - a. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
  - b. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - c. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura;
  - d. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
  - e. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; dan
  - f. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.
2. Komisi IV DPR RI menerima usulan Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024 yaitu:
  - a. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
  - b. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; dan
  - c. RUU tentang Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.
3. Komisi IV DPR RI menerima usulan Pemerintah c.q. Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024 yaitu:
  - a. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
  - b. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 27 Tahun 2007 jo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan
  - c. Perubahan UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
4. Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan Kajian atau Ringkasan beserta Skala Prioritas terhadap setiap usulan Rancangan Undang-Undang kepada Komisi IV DPR RI paling lambat 2 (dua) hari setelah Rapat Dengar Pendapat tanggal 11 November 2019.
5. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan kajian, sinkronisasi dan penyederhanaan terhadap seluruh Undang-Undang bidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan, serta Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya, hasil kajian disampaikan kepada Komisi IV DPR RI paling lambat sebelum Rapat Kerja berikutnya.

6. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan atau menginformasikan setiap Peraturan Menteri yang akan diterbitkan dan/atau yang akan mengalami perubahan.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.45 WIB.

Komisi IV DPR RI  
Ketua Rapat,

Ttd.

**Sudin, S.E.**  
A-151

Sekretaris Jenderal  
Kementerian Pertanian

Ttd.

**Dr. Ir. Momon Rusmono, M.S.**

Sekretaris Jenderal Kementerian  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Ttd.

**Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.**

Sekretaris Jenderal  
Kementerian Kelautan dan Perikanan,

Ttd.

**Ir . R. Nilanto Perbowo, M.Sc.**